
INSTITUT FISILOGI DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO
JURNAL AKADEMIKA

<http://ejurnal.iftkledalero.ac.id/index.php/akd/index>

Post-Democracy, Artificial Intelligence dan Peluang Populisme Pancasila di Indonesia

Arsenius Nega^{1*}

¹Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
Pos-el: francescoagnesranubaya@gmail.com

Diajukan: October, 2020; **Direview:** Oktober; **Diterima:** November 11, 2020; **Dipublis:** December, 2020

Abstrak: Artikel ini merupakan ikhtiar penulis menganalisis *post-democracy* sebagai gambaran praktik politik yang melampaui atau keluar dari prinsip dan nilai esensi demokrasi di Indonesia. Realitas akut ini diperparah dengan semakin berkembangnya *artificial intelligence* yang melahirkan aneka aplikasi kecerdasan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan apa saja, termasuk yang berseberangan dengan nilai-nilai demokrasi. Penulis akan memakai metode analitis-kritis dalam membedah persoalan ini. Pertama-tama akan dijelaskan secara teknis konseptual tentang *post-democracy* dan *artificial intelligence*. Selanjutnya, penulis akan berkonsentrasi pada kondisi *post-democracy* yang diperparah lagi oleh hadirnya *artificial intelligence*. Sebagai penutup, penulis memproposalkan populisme pancasila sebagai basis partisipasi politik warga negara untuk membela rasionalitas dan kebenaran sembari membangun pengetahuan dan etik bernegara dalam merawat keindonesiaan.

Kata Kunci: *Post-democracy, artificial intelligence, populisme pancasila, dan partisipasi politik.*

Pendahuluan

Demokrasi kerap kali digaungkan sebagai tata politik terbaik yang pernah ada. Atas dasar itu, mencuat keyakinan bahwa proses politik dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai luhur demokrasi yang dianut bersama. Namun, menyitir Thomas Meyer, dalam prosesnya ‘musuh-musuh demokrasi’ beranak pinak dan meracuni etos demokratis.¹ Musuh-musuh demokrasi tersebut diproduksi oleh orang dan atau kelompok tertentu yang kapitalistik dan anarkis. Dalam tulisan ini, penulis menyebut musuh-musuh demokrasi atau berbagai ketimpangan yang mengancam moralitas bangsa ini sebagai *post-democracy*. Pada saat *post-democracy* memenuhi lanskap perpolitikan Indonesia, teknologi *artificial intelligence* (selanjutnya AI) hadir dengan berbagai risiko yang berpotensi melumpuhkan demokrasi. Pada dasarnya memang AI dirancang sebagai instrumen atau suplemen yang membantu seluruh proses kerja manusia. Namun, tidak dapat dielakkan bahwa teknologi AI adalah suatu kondisi yang memodifikasi perilaku

¹ F. Budi Hardiman, *Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari Bangsa Setan-setan, Radikalisme Agama, sampai Post-Sekularisme* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2018), hlm. 48.

manusia sebagai penggunaannya.² AI dapat menggantikan peran manusia seutuhnya dan berpeluang memperparah patologi demokrasi yang sedang terjadi. Sebab, sejauh ini pemanfaatan AI ini belum diimbangi dengan kesadaran moral dan rasionalitas yang mumpuni baik dari manusia sebagai pengendali maupun AI sebagai instrumen. AI dalam dirinya sendiri hanya sebatas sebagai alat yang cerdas tetapi tidak memiliki kesadaran. Berhadapan dengan berbagai krisis demokrasi ini yang kemudian diperparah dengan hadirnya AI, populisme muncul sebagai gerakan politik kontra rezim yang sedang berkuasa dan diyakini membawa harapan bagi transformasi demokrasi. Namun, hemat penulis, untuk konteks Indonesia, baik populisme kanan maupun populisme kiri justru berbalik menjadi pengkhianat demokrasi. Politisi populis yang semakin eksis di ruang siber belum sanggup menyelamatkan demokrasi. Oleh karena itu, urgen bagi bangsa Indonesia untuk menghidupi populisme pancasila sebagai jalan politik ideal yang berupaya untuk membela rasionalitas dan kebenaran.

Post-democracy: Bersatunya Demokrasi dan Anarkisme

Krisis demi krisis senantiasa mewarnai proses demokratisasi yang muncul dalam aneka cara dan bentuk. Menurut Collin Crouch, fakta tentang krisis dan kemunduran yang terjadi pada demokrasi tersebut merupakan gejala laten dari *post-democracy*.³ Di satu sisi, demokrasi membawa kemajuan signifikan, tetapi di sisi lain justru memproduksi banyak kemunduran. Dalam bukunya, *Posrealitas*, Yasraf Amir Piliang menegaskan bahwa ada dua wajah demokrasi, yaitu demokrasi sebagai realitas kehidupan sosial sehari-hari dan demokrasi sebagaimana ia direpresentasikan sebagai citra di dalam berbagai media informasi.⁴ Suatu negara diviralkan lewat citraan-citraan yang ditampilkan secara sistematis lewat media sosial sebagai yang demokratis, tetapi sebenarnya hanya sebagai topeng yang menutupi fakta sesungguhnya, misalnya totaliter dan anarkis. Citra demokrasi kerap kali berjalan tidak sesuai dengan realitas demokrasi yang menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam demokrasi itu sendiri.

Ketika citra demokrasi telah terputus sama sekali dengan realitas demokrasi yang sesungguhnya, maka yang terbentuk adalah *post-democracy*. *Post-democracy* berarti demokrasi yang melampaui atau yang berlangsung hanya pada tingkat citra dan telah terputus dari dunia realitas atau terputus dari prinsip demokrasi itu sendiri.⁵ Era revolusi digital sekarang ini menyediakan platform bagi para pengguna termasuk untuk tujuan mengembangkan demokrasi pada tingkat citra ini. Citra sesungguhnya menggambarkan deviasi dan topeng yang muncul dalam negara seperti Indonesia yang seolah-olah demokratis. Alih-alih membangun demokrasi, justru perlahan tapi pasti memelihara watak anarkisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, *post-democracy* sebagaimana ditegaskan Piliang⁶ adalah sebuah kondisi yang di dalamnya prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan (berpendapat, berserikat), hak asasi manusia, persamaan, pluralisme berkembang dalam praktiknya ke arah ekstrim, sehingga melampaui prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Kini, ketika ruang digital semakin mudah diakses, setiap orang bisa menjadi tuan dan memiliki kebebasan mutlak untuk memberi komentar atau mengunggah apa saja, sekalipun

² F. Budi Hardiman, *Aku Klik Maka Aku Ada: Manusia dalam Revolusi Digital* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2021), hlm. 28.

³ Collin Crouch, *Post-Democracy* (Cambridge: Polity Press, 2004), hlm. 3.

⁴ Yasraf Amir Piliang, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika* (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), hlm. 253.

⁵ *Ibid.*, hlm. 254.

⁶ *Ibid.*, hlm. 255.

bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Sekarang esibisionisme, narsisme dan voyerisme justru mendapat panggungnya di ruang digital tanpa pengawasan moral.⁷ Kebebasan baru ini pun menghasilkan brutalitas yang tak terkendali. Di Indonesia, brutalitas ini juga terwujud dalam ekspresi kebencian terhadap para penganut agama lain yang kemudian menyuburkan benih-benih radikalisme.

Identifikasi Artificial Intelligence

Secara umum, AI merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia. AI adalah sistem yang berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, berpikir rasional dan sistem yang bertindak secara rasional.⁸ Senada dengan itu, Agus Sudibyo menjelaskan bahwa AI adalah produk teknologi yang dibuat semakin cerdas dan mendekati kemampuan manusia berkat pasokan data perilaku pengguna internet yang diberikan secara gratis.⁹ Tidak heran jika AI yang bergerak berdasarkan data ini memiliki kemampuan analitik, efisiensi kerja yang tinggi, pembelajaran mandiri dan sanggup mengambil keputusan secara objektif. Kelebihan macam ini juga dimiliki manusia, tetapi aplikasi kecerdasan AI memiliki kemampuan lebih dan efektif.

Proyek paling awal di bidang *artificial intelligence* dilakukan pada pertengahan abad ke-20 oleh ahli logika dan perintis komputer Inggris, Alan Mathison Turing. Pada tahun 1935 Turing mendeskripsikan mesin komputasi abstrak yang terdiri dari memori tak terbatas dan pemindai yang bergerak bolak-balik melalui memori dan simbol. Ini adalah konsep program tersimpan Turing yang memungkinkan mesin beroperasi, memodifikasi atau meningkatkan programnya sendiri.¹⁰ Kemudian pada tahun 1956 ilmuwan komputer Profesor John McCarthy memperkenalkan lagi konsep tentang *artificial intelligence*. Pada saat itu dimulai langkah pertama untuk merintis pengembangan kecerdasan buatan.¹¹ Kendati pada saat itu, istilah AI belum begitu dikenal luas, tetapi telah banyak inovator yang mencoba merancang sistem kecerdasan buatan. Kemudian, pada tahun 2000-an AI ini berkembang pesat dan membawa pengaruh besar bagi dunia industri.

Dalam koridor kemajuan yang amat pesat, kini AI telah banyak digunakan dalam hampir semua bidang kehidupan manusia. AI memiliki potensi besar untuk memajukan bidang pendidikan, pertahanan, kesehatan, perbankan, ketahanan pangan, industri manufaktur, hiburan, reformasi birokrasi dan lain-lain. AI dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem produksi dan operasional pada setiap sektor kehidupan. Pada titik ini, AI telah banyak membantu manusia kendati pada saat yang sama menggeser peran manusia, bahkan berbahaya bagi manusia. Namun, banyak orang meyakini bahwa di era kemajuan AI ini akan muncul juga beragam lapangan pekerjaan baru yang mau tidak mau menuntut para pekerja untuk memiliki kemampuan memadai dan *link and match* dengan pasar tenaga kerja.

⁷ F. Budi Hardiman, *Aku Klik Maka Aku Ada*, *op.cit.*, hlm. 45.

⁸ Lasse Rouhiainen, *Artificial Intelligence: 101 Things You Must Know Today About Our Future* (USA: Amazon Books, 2018), hlm. 87.

⁹ Agus Sudibyo, *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 386.

¹⁰ Muhammad Zaenuddin, *Apa Itu Artificial Intelligence? Pengertian, Manfaat, dan Penerapannya*, *kompas.com*, dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/31/120100965/apa-itu-artificial-intelligence-pengertian-manfaat-dan-penerapannya?>, diakses pada 7 Oktober 2023.,

¹¹ Pengelola Web Direktorat SMP, *Mengenal Artificial Intelligence: Teknologi Yang akan Mengubah Kehidupan Manusia*, dalam <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/mengenal-artificial-intelligence-teknologi-yang-akan-mengubah-kehidupan-manusia/>, diakses 7 Oktober 2023.

Tanpa bermaksud menutupi kontribusi positif AI bagi peradaban manusia saat ini, AI juga harus dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya dan melahirkan risiko bagi umat manusia. Penting juga bagi kita untuk waspada dan adaptif dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bentuk AI. Berkenaan dengan ini, Elon Musk pernah mengatakan bahwa AI atau kecerdasan buatan lebih bahaya daripada nuklir. Perkembangan AI berpotensi membahayakan semua manusia di mana pun. Dalam tulisan ini, penulis akan mengaitkan kehadiran AI dengan situasi demokrasi di Indonesia. Mungkin banyak aplikasi kecerdasan buatan yang telah diadopsi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dan pelayanan publik. Atau ruang digital menjadi wadah baru bertemunya para warga negara untuk berdiskursus. Namun, penggunaan aplikasi kecerdasan buatan ini juga mendatangkan banyak tantangan serius, terutama di era politik pasca-kebenaran yang. Ketika telah berhasil meraih kebebasan mutlak di dalam ruang digital, warga negara bebas memanfaatkan segala bentuk aplikasi AI. Dengan demikian, AI sebagai hasil kerja manusia ini berbahaya juga dalam demokrasi karena berpotensi digunakan untuk tujuan memerangi prinsip-prinsip demokrasi yang dipegang bersama.

Post-democracy dan Artificial Intelligence

Berikut penulis akan mengulas kondisi tumpang tindih demokrasi sebagai gambaran *post-democracy* di Indonesia yang diperparah dengan kehadiran AI dan prakondisi kebobrokan moral bangsa. *Pertama*, kapitalisme-neoliberalisme: yang digadang-gadang menyejahterakan masyarakat, justru membawa kehancuran dan pemiskinan sistemik. Di Indonesia, disadari atau tidak, agenda politik diatur oleh mekanisme pasar dalam hegemoni kaum kapitalis. Kepentingan kaum kapitalis neoliberal diutamakan serentak melupakan kepentingan rakyat banyak. Menjadi lebih parah dan memprihatinkan, karena negara sendirilah yang menjadi fasilitator kaum kapitalis.¹² Dengan kondisi ini, tatanan demokrasi selalu digembosi oleh oknum-oknum yang mengeruk keuntungan dan menancapkan paku kekuasaannya. Demokrasi kita telah dan sedang dibajak para oligark.

Jadi, kekuasaan tidak hanya menjadi monopoli pemerintah yang berkuasa, tetapi juga berada di tangan agen-agen kapitalisme-neoliberalisme. Akibat lanjutannya ialah semakin dominannya partai politik oligarkis dalam gelanggang perpolitikan tanah air. Proses politik pun berjalan dalam pendekatan yang cenderung represif, marginalisasi, dan menafikan aspirasi masyarakat akar rumput. Secara ringkas, praktik politik kapitalisme berdaya menghancurkan partisipasi politik *demos*.¹³ Politik kapitalisme pun dapat menjadi predator demokrasi yang berdaya memproduksi aneka persoalan akut lainnya. Politik kapitalisme ini pun sudah dan sedang memperluas pengaruhnya dalam dunia digital. Para pemilik modal akhirnya mengandalkan kekuatan data dan algoritma untuk semakin menguasai konstelasi politik-ekonomi nasional dan global. Tidak sedikit para otokrat dan oligark baru yang berbicara atas nama demokrasi¹⁴ memanfaatkan AI sebagai sarana dan kekuatan baru untuk semakin eksis dan memaksimalisasi keuntungan.

Kedua, politik pasca-kebenaran (*post-truth politics*). Digitalisasi telah membuka era baru dalam sejarah peradaban manusia, yakni politik pasca-kebenaran. Lee McIntyre, menerangkan bahwa awalan

¹² Cypri Jehan Paju Dale, *Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik* (Labuan Bajo: Sunspirit Book, 2013), hlm. 148.

¹³ Aris Arif Mundayat, "Mengembalikan Republik Melalui Populisme Pancasila: Mungkinkah?" dalam Wijayanto, dkk (eds.), *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia* (Depok: LP3ES, 2021), hlm. 581.

¹⁴ F. Budi Hardiman, *Aku Klik Maka Aku Ada*, *op.cit.*, hlm. 113.

post- itu tidak dimengerti secara temporal, yakni bukan sebagai “setelah”, melainkan dalam arti bahwa kebenaran telah sirna atau tidak lagi relevan.¹⁵ Atau dengan kata lain, kebenaran dianggap ‘tamat’ dan bahkan tidak dibutuhkan dalam kehidupan berpolitik. Di dalam era pasca-kebenaran, orang mengabaikan etika berpendapat, meminggirkan fakta, mengunggulkan daya tarik emosi massa dan keyakinan pribadi. Hoaks dan ujaran kebencian pun merajalela untuk kepentingan tertentu. Tentang ini, Budi Hardiman menulis:

Di tengah era pasca-kebenaran ini, sistem politik kita dijejali dengan teori-teori konspirasi, ujaran-ujaran kebencian dan fitnah-fitnah, demokrasi tidak lagi menjadi arena adu argumen, melainkan berubah menjadi sesi provokasi, yang menghipnotis massa dengan sentimen-sentimen kolektif.¹⁶

Dengan demikian, demokrasi yang seharusnya dipupuk dengan rasionalitas berubah menjadi arena propaganda, provokasi dan penyebaran berita bohong. Politik pasca-kebenaran ini pun, demikian Hardiman, terus diciptakan oleh AI media-media sosial yang secara otomatis mengarahkan para pengguna untuk terpolarisasi ke dalam kawan dan lawan.¹⁷ Kecerdasan buatan telah berhasil mengendalikan dan memengaruhi warga negara untuk saling membenci satu sama lain.

Ketiga, fanatisme dan fundamentalisme agama. Era pasca-kebenaran yang meremehkan fakta serentak mengedepankan emosi dan sentimen pribadi turut membentuk fanatisme dalam hidup bersama. Fanatisme sangat menantang bagi demokrasi dewasa ini. Media-media sosial dapat menjadi wadah untuk menyebarkan karakter fanatis sebagai warga negara dan warganet, misalnya membenci, menghina dan mengancam orang lain. Modifikasi teknologi dan propaganda-propaganda di dalam media sosial dapat membuat orang menjadi fanatik.¹⁸ Hal itu menjadi lebih mudah ketika identitas suku, agama, ras dan antargolongan berpotensi memicu fanatisme berbagai bentuk, khususnya yang terkait agama. Pada akhirnya, fanatisme dapat melahirkan gerakan fundamentalisme agama.

Di Indonesia, fundamentalisme agama marak terjadi. Ancaman nyata ini bermula dari kecendrungan berpikir sempit orang-orang beragama yang mudah bertindak sewenang-wenang dan diskriminatif dengan orang atau kelompok yang berasal dari agama lain.¹⁹ Dengan tafsiran yang keliru, ajaran-ajaran agama dapat menjadi tameng untuk membenarkan tindakan-tindakan diskriminatif yang jelas-jelas bertentangan dengan agama itu sendiri dan mencoreng nilai-nilai kemanusiaan universal. Kelompok ini juga berani memilih jalan konservatif untuk coba merebut kekuasaan politik dan memaksa ideologi agamanya sebagai basis hidup bernegara. Namun, sebenarnya cita-cita untuk membangun sebuah negara yang berbasiskan ideologi atau agama tertentu merupakan sebuah bentuk kemunduran sejarah

¹⁵ Lee McIntyre, *Post-Truth* (London: The MIT Press, 2018), hlm. 5. Kebenaran adalah kualitas hubungan antara pengetahuan dan kenyataan. Idea besar yang memandu zaman kita adalah idea tentang fakta sebagai kebenaran atau kebenaran faktual. Bdk. F. Budi Hardiman, *Kebenaran dan Para Kritikus* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2023), hlm. 11, 176.

¹⁶ F. Budi Hardiman, *Aku Klik Maka Aku Ada*, *op.cit.*, hlm. 97.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 111.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 67.

¹⁹ F. Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011), hlm. 12.

peradaban umat manusia.²⁰ Orang-orang fanatik merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Mereka bermasalah bagi demokrasi, bukan karena meyakini kebenaran yang mereka pandang absolut, melainkan karena memaksakan kebenaran versi mereka itu ke dalam kehidupan bersama secara politis.²¹ Disadari atau tidak, demokrasi kita telah lama dikooptasi oleh kelompok radikal yang berpura-pura demokratis. Alih-alih membangun kesalehan pribadi dan peran transformasi sosial, pilihan beragama justru menumbuhkan anarkisme berkepanjangan, melanggar nilai pluralisme dan hak asasi manusia.

Keempat, Formalisme dan politisi oportunis. Hemat penulis, di Indonesia, demokrasi berjalan terseok-seok di bawah kepemimpinan para politisi oportunis dan formalistis. Politisi oportunis pandai obral janji, tetapi tidak bisa bekerja demi pembangunan yang berguna bagi rakyat banyak. Senada dengan itu, formalisme menunjukkan politis yang pandai tampil memukau seperti tokoh panutan, tetapi hanya secara munafik dan pura-pura tanpa hati nurani yang terusik. Hanya mau citra baik di tengah masyarakat untuk kepentingan pribadi.²² Persoalan ini menjadi lebih parah dan bertumbuh subur dengan hadirnya internet dan AI yang turut mentransformasi dunia politik dan menciptakan jenis masyarakat yang berbeda.²³ Moralitas bangsa ikut terpuruk jika selalu dipimpin dan dikuasai oleh politisi yang formalistis dan oportunis yang diproduksi oleh politik kapitalisme dan menjadi predator demokrasi.

Kelima, anti-intelektualisme dan matinya oposisi. Secara sederhana, anti-intelektualisme adalah gejala penolakan atau setidaknya perendahan terhadap segala upaya manusia untuk mengambil sikap reflektif, berpegang pada konsep, ide atau pemikiran dan perendahan terhadap mereka yang bekerja di dalamnya.²⁴ Dalam bidang politik, aktus anti-intelektualisme tampak dalam gaya berpolitik para politikus yang hanya bisa berargumen secara emosional, tidak kritis dan alergi terhadap berbagai kritikan. Selain itu, anti-intelektualisme juga merebak dalam kerumunan warga atau massa mengambang yang tidak kritis dan anarkis. Anti-intelektualisme ini mendapat tempatnya dalam politik pasca-kebenaran yang dipermudah juga dengan perkembangan media sosial dan berbagai aplikasi kecerdasan buatan.

Secara meluas, fenomena ini berdampak pada matinya oposisi dalam berdemokrasi. Padahal demokrasi hanya bisa berjalan baik jika dikontrol secara ketat. Oposisi mesti independen sehingga dapat memberi kritik secara bebas dan merepresentasikan kepentingan masyarakat umum.²⁵ Ketiadaan oposisi sama dengan lonceng baru bagi kematian demokrasi, kekuasaan luput dari kontrol dan kritik dan sebagai prakondisi langgengnya politik kapitalisme yang merongrong esensi moral bangsa.

Peluang Populisme Pancasila di Indonesia

Populisme pancasila hadir di tengah ketiadaan kekuatan kiri dan nasionalis progresif di Indonesia dalam mengatasi ketimpangan demokrasi. Tampak, populisme kanan (Populisme Islam) hanya meningkatkan dikotomi minoritas-mayoritas, ego sektarian, kasus intoleransi dan perselingkuhan politisi dan oligarki. Sedangkan populisme kiri yang disponsori oleh para aktivis sayap kiri masih menempuh

²⁰ Otto Gusti Madung, "Pancasila, Demokrasi Liberal dan Komunitarisme", dalam *Jurnal Ledaero*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014, hlm. 321.

²¹ Mathias Daven, "Fundamentalisme Agama sebagai Tantangan bagi Negara", dalam *Jurnal Ledalero*, Vol. 15, No. 2, tahun 2016, hlm. 289.

²² Isidorus Lilijawa, *Mengapa Takut Berpolitik?* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007), hlm. 33.

²³ Yuval Noah Harari, *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow* (New York City: Vintage Publishing, 2017), hlm. 455.

²⁴ Robertus Robet, "Anti-Intelektualisme di Indonesia", dalam opini *Kompas*, 25 April 2016, hlm. 6.

²⁵ Dadang Juliantara, *Meretas Jalan Demokrasi* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm. 78.

strategi-strategi yang cenderung liberal, individual, fragmentaris dan tidak terorganisasi.²⁶ Oleh karena itu, urgen untuk diperkenalkannya populisme pancasila. Pertanyaan yang perlu diajukan ialah mengapa harus pancasila? Secara sederhana, argumen yang dapat dibangun adalah sebab dalam sejarah bangsa Indonesia dan tetap bertahan hingga sekarang, pancasila merupakan *philosophische grondslag*, identitas kolektif bangsa yang terbukti mampu menyatukan kebhinekaan bangsa Indonesia dan sebagai moral publik kita.²⁷ Pancasila adalah milik semua warga negara Indonesia yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bersama, prinsip kolektif berbangsa, mampu memperkuat kohesi sosial dan alternatif jalan politik yang utuh dan demokratis.

Menurut Aris Arif Mundayat, populisme pancasila adalah strategi meradikalisasi demokrasi di Indonesia dengan cara menegakkan mata rantai ekuivalensi kesadaran untuk mengikis ketidakadilan agar demokrasi dapat kembali pada koridor politiknya.²⁸ Melalui definisi ini, kita dapat meyakini bahwa populisme pancasila menjadi gerakan sosial dan perjuangan demokratik baru yang berupaya melawan modus-modus penindasan politik kapitalisme yang telah lama menjadi predator demokrasi. Kini, penindasan itu pun berkembang ke arah kapitalisme digital global yang ditandai dengan tendensi mendominasi, mengendalikan dan mengarahkan warga negara dan warganet. Gerakan untuk mengimbangi politik kapitalisme ini tidak boleh dibangun secara partikular dan oportunistik. Masyarakat warga sebagai masyarakat politis harus menyatukan kekuatan, berpartisipasi secara aktif dan bersatu membentuk jalinan rantai ekuivalensi.²⁹ Mereka dapat mengaktifkan ruang intersubjektif bersama, komunikasi dan keutamaan-keutamaan berpolitik demokratis.

Rantai ekuivalensi yang membentuk perlawanan terhadap hegemoni politik kapitalisme itu dapat dibangun di antara para buruh, aktivis lingkungan hidup, aktivis HAM dan demokrasi, aktivis agama dan kelompok-kelompok pro demokrasi lainnya. Di antara banyak kelompok ini terbentuk solidaritas kolektif yang kuat bagi terpenuhinya harapan akan perubahan yang menghargai hak setiap warga negara dalam berdemokrasi. Hasrat kolektif dimobilisasi di ruang publik riil agar sesuai dengan design demokratis. Dunia digital tetap harus dianggap sebagai tatanan sekunder, sementara yang primer tetap dunia korporeal.³⁰ Perjuangan semacam ini tentu tidak mudah, tetapi yang paling penting setiap warga negara memiliki komitmen dan daya juang yang harus dirawat. Jadi, populisme pancasila bertujuan untuk membangun mata rantai kesetaraan berbasis kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan etika republik menjadi spirit utama.³¹ Hal ini diamini Silvano Keo Bhaghi yang menyatakan bahwa prinsip umum dan titik tolak pancasila adalah perikemanusiaan yang

²⁶ L. Djani, Olle Tornquist, O. Tanjung dan S. Tjandra, *Dilemmas of Populist Transactionalism: What Are the Prospects Now for Popular Politics in Indonesia* (Yogyakarta: POLGOV UGM, 2017), hlm. 146.

²⁷ Otto Gusti Madung, "Pancasila, Demokrasi Liberal dan Komunitarisme, *op.cit.*, hlm. 312.

²⁸ Aris Arif Mundayat, *op.cit.*, hlm. 581.

²⁹ Ferdi Jehalut, *Paradoks Demokrasi: Telaah Analitis dan Kritik Atas Pemikiran Chantal Mouffe* (Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2020), hlm. 113.

³⁰ F. Budi Hardiman, *Aku Klik Maka Aku Ada*, *op.cit.*, hlm. 56.

³¹ Aris Arif Mundayat, *op.cit.*, hlm. 586. Pada bagian ini perlu dijelaskan juga tentang etika republik atau republikanisme. Republikanisme menggarisbawahi pentingnya tatanan makna bersama (*Gemeinsinn*), perjuangan untuk nilai-nilai bersama dan komitmen warga. Pemikir modern yang menaruh perhatian khusus bagi dan mengembangkan konsep republikanisme ialah Jean-Jacques Rousseau. Dengan konsep kedaulatan rakyat dan *volonte generale*, ia memberikan warga substansial khas bagi paham republikanisme. Lihat Otto Gusti Madung, *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis* (Mamere: Penerbit Ledalero, 2013), hlm. 124.

merupakan pelaksanaan cinta terhadap sesama manusia sebagai pribadi yang mesti diakui dan dihormati.³²

Populisme pancasila bukan untuk memberangus kekuatan politik yang dianggap lawan, tetapi merupakan strategi untuk melibatkan diri dalam perjuangan yang agonistik secara politik. Menurut Mouffe demokrasi agonistik berintensitas menawarkan suatu alternatif yang menjaga ketidakberdamaian identitas adversarial tanpa menimbulkan permusuhan terbuka dan adanya pengakuan akan perbedaan-perbedaan.³³ Yang dibangun bukan musuh, melainkan lawan yang berhak mempertahankan posisinya. Dalam arti tertentu, sebagaimana Otto Gusti Madung, lawan dipahami sebagai musuh yang legitim.³⁴ Artinya, dalam fakta kemajemukan, agonisme itu mungkin dan mutlak perlu sebagai strategi mendidik warga negara untuk berdiskursus secara rasional dalam perbedaan, dengan mengedepankan etika republikanisme dan melanggengkan peluang untuk terus berpartisipasi sebagai warga negara. Hal ini penting di tengah era politik pasca-kebenaran untuk menghentikan laju kebohongan dan ujaran kebencian di antara para warga negara yang disebarkan melalui aplikasi kecerdasan buatan di media-media sosial.

Agonisme dan demokrasi radikal Mouffe ini merupakan bagian dari inti kritiknya terhadap demokrasi deliberatif yang dibangun oleh Jürgen Habermas. Dibandingkan dengan teori demokrasi deliberatif, demokrasi radikal memberi penekanan bahwa kohesi sosial tidak diciptakan lewat rasionalitas komunikatif atau prosedur deliberatif, tetapi melalui pertarungan wacana politis. Pancasila menjadi identitas kolektif ketika ia ditematisasi dan menjadi objek pertarungan wacana di ruang publik.³⁵ Setiap orang terbuka pada kemungkinan untuk mencapai kebenaran dan juga dapat salah. Monopoli kelompok (ideologi-agama) tertentu untuk menjadi lebih dominan dan interpretasi nilai-nilai pancasila yang keliru dapat ditekan. Ketika perdebatan tentang pancasila ditampilkan secara demokratis, warga negara dapat mengaktualisasi diri sebagai bagian utuh dari komunitas politis bernama Indonesia dan tidak terpisahkan dari yang lain. Oleh karena itu, demokrasi pancasila didasarkan pada semangat kebersamaan atau kolektivisme yang hidup dalam hati sanubari setiap warga negara, di mana kehidupan seseorang dianggap sebagai bagian dari kehidupan masyarakat secara keseluruhan.³⁶ Dengan itu, setiap orang dilibatkan dan berpartisipasi secara demokratis demi kebaikan bersama. Sebab, ciri esensial dalam demokrasi adalah adanya keikutsertaan (partisipasi) warga negara.

Berhadapan dengan berbagai macam patologi sosial politik bangsa Indonesia, populisme pancasila juga dapat diterjemahkan secara lebih konkret. Atau dengan kata lain, dengan berlandaskan pada populisme pancasila, warga negara dapat berpartisipasi secara aktif membangun hidup bersama yang lebih baik. Karena itu konkretisasi populisme pancasila yang berbasis pada etika republikanisme dan politik kewargaan ialah di antaranya respek terhadap martabat manusia, melihat negara sebagai sarana berpolitik dan bukan tujuan, solidaritas kolektif, terbuka dan menerima perbedaan, diskursus yang mengutamakan fakta, moralitas dan kebenaran faktual, menghidupkan kultur intelektualisme dan kritisisme serta mengembangkan etika kepedulian.

³² Silvano Keo Bhaghi, *Negara Bukan-Bukan?: Driyarkara tentang Pancasila dan Persoalan Relasi Antara Agama dan Negara* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2016), hlm. 124.

³³ Ferdi Jehalut, *op.cit.*, hlm. 91.

³⁴ Otto Gusti Madung, *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2017), hlm. 133.

³⁵ Otto Gusti Madung, "Pancasila, Demokrasi Liberal dan Komunitarisme, *op.cit.*, hlm. 332.

³⁶ Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia. Pemikiran Politik Bung Hatta* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 184.

Diinspirasi oleh spirit populisme pancasila, pemerintah dan warga negara penting berkolaborasi secara kritis untuk waspada, kontrol diri, beradaptasi dan bijak dalam menghadapi pengaruh AI yang tak terkendali agar tidak mudah menjadi objek dan buta terhadap kemajuan. Negara demokrasi seperti Indonesia juga perlu memperkuat sistem hukum sebagai “sabuk pengaman” demokrasi di tengah kemajuan AI. Hukum bertujuan untuk mengatur dan memberi batas akhir yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dalam praktik politik demokratis,³⁷ terlebih dalam era revolusi digital sekarang ini. Dengan demikian, warga negara tidak sebebas-bebasnya memanfaatkan media sosial dan AI yang pada akhirnya berdaya memberangus nilai-nilai demokrasi. Secara tidak langsung, warga negara sedang membentuk habituasi praktik demokrasi yang lebih bermartabat, membuka jalan bagi “kembalinya politik”, berperan serta memulihkan moral bangsa serentak merawat keindonesiaan.

Penutup

Post-democracy ditandai berbagai krisis demokrasi, seperti neoliberalisme, politik pasca-kebenaran, fanatisme dan fundamentalisme agama, politik oportunis dan anti-intelektualisme. Situasi ini menjadi lebih parah dengan kemajuan teknologi informasi, terutama karena kehadiran *artificial intelligence*. Melalui sarana dan kekuatan baru, *artificial intelligence* ini warga negara dapat melakukan apa saja, termasuk yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Berhadapan dengan persoalan ini, populisme kanan-kiri digadang-gadang menjadi kekuatan tandingan. Namun, secara riil, keduanya justru menyebabkan terjadinya polarisasi, membangun gerakan-gerakan partikular dan belum menjadi kekuatan yang kritis dan otonom. Dengan demikian, populisme pancasila menjadi urgen dan menjadi model populisme yang dibutuhkan demi perbaikan atmosfer demokrasi yang dirongrong politik kapitalisme, era pasca-kebenaran dan digitalisasi. Populisme pancasila menjadi strategi meradikalisasi demokrasi di Indonesia dengan cara menegaskan identitas kolektif bangsa, membela rasionalitas, kebenaran dan mengikis ketidakadilan agar demokrasi dapat kembali pada koridor politiknya. Dengan itu, warga negara ikut berpartisipasi secara aktif membentuk habituasi praktik demokrasi yang lebih bermartabat, memulihkan moral bangsa serentak merawat keindonesiaan.

Daftar Rujukan

- Crouch, Collin. *Post-Democracy*. Cambridge: Polity Press, 2004.
- Daven, Mathias. “Fundamentalisme Agama sebagai Tantangan bagi Negara”, dalam *Jurnal Ledalero*, Vol. 15, No. 2, Desember 2016.
- Djani, L, Olle Tornquist, O. Tanjung dan S. Tjandra. *Dilemmas of Populist Transactionalism: What Are the Prospects Now for Popular Politics in Indonesia*. Yogyakarta: POLGOV UGM, 2017.
- Hardiman, F. Budi. *Aku Klik Maka Aku Ada: Manusia dalam Revolusi Digital*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2021.
- _____. *Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari Bangsa Setan-setan, Radikalisme Agama, sampai Post-Sekularisme*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2018.
- _____. *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011.
- _____. *Kebenaran dan Para Kritikusnya: Mengulik Idea Besar yang Memandu Zaman Kita*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2023.

³⁷ F. Budi Hardiman, *Aku Klik Maka Aku Ada*, op.cit., hlm. 119.

- Jehalut, Ferdi. *Paradoks Demokrasi: Telaah Analitis dan Kritik Atas Pemikiran Chantal Mouffe*. Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2020.
- Juliantara, Dadang. *Meretas Jalan Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- Keo Bhaghi, Silvano. *Negara Bukan-Bukan?: Driyarkara tentang Pancasila dan Persoalan Relasi Antara Agama dan Negara*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- Lilijawa, Isidorus. *Mengapa Takut Berpolitik?*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007.
- Madung, Otto Gusti. *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- _____. *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- _____. “Pancasila, Demokrasi Liberal dan Komunitarisme”, dalam *Jurnal Ledaero*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014.
- McIntyre, Lee. *Post-Truth*. London: The MIT Press, 2018.
- Mouffe, Chantal. *For A Left Populism*. Verso Books, 2018.
- Mundayat, Aris Arif. “Mengembalikan Republik Melalui Populisme Pancasila: Mungkinkah?” dalam Wijayanto, dkk (eds.), *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*. Depok: LP3ES, 2021.
- Noah Harari, Yuval. *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*. New York City: Vintage Publishing, 2017.
- Paju Dale, Cypri Jehan. *Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik*. Labuan Bajo: Sunspirit Book, 2013.
- Pengelola Web Direktorat SMP, “Mengenal Artificial Intelligence: Teknologi Yang akan Mengubah Kehidupan Manusia”. <<https://ditsmp.kemdikbus.go.id/mengenal-artificial-intelligence-teknologi-yang-akan-mengubah-kehidupan-manusia/>>
- Piliang, Yasraf Amir. *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*. Yogyakarta: Jalasutra, 2004.
- Robet, Robertus. “Anti-Intelektualisme di Indonesia”, dalam opini *Kompas*, 25 April 2016.
- Rouhiainen, Lasse. *Artificial Intelligence: 101 Things You Must Know Today About Our Future*. USA: Amazon Books, 2018.
- Sudibyo, Agus. *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Suleman, Zulfikri. *Demokrasi Untuk Indonesia. Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Zaenuddin, Muhammad. “Apa Itu Artificial Intelligence? Pengertian, Manfaat, dan Penerapannya”. <<https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/31/120100965/apa-itu-artificial-intelligence-pengertian-manfaat-dan-penerapannya>>